

Judul : RUU Komoditas strategis, Baleg ingin lindungi harga dan usaha tani
Tanggal : Minggu, 08 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Komoditas Strategis Baleg Ingin Lindungi Harga Dan Usaha Tani

SUMBER: IC PHOTACH



Andi Yuliani Paris

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Andi Yuliani Paris berharap RUU Komoditas Strategis jadi instrumen keberpihakan negara kepada petani dan masyarakat. Regulasi itu tidak boleh berhenti hanya pada pengaturan sanksi tanpa memastikan perlindungan harga dan keberlanjutan usaha tani.

Menurut Andi, pembahasan RUU Komoditas Strategis harus jadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian nasional. Sehingga regulasi ini bisa menjawab persoalan struktural yang selama ini membuat petani berada dalam posisi lemah di hadapan pasar.

Dia bilang, kehadiran negara masih lemah dalam melindungi petani komoditas strategis dari fluktuasi harga dan ketidakpastian kebijakan. Selama ini, petani lebih sering jadi korban sistem yang tidak terintegrasi antara pembiayaan, riset, dan produksi.

"Padahal di Thailand, mulai dari pihak bank sampai lembaga penelitiannya itu jaringannya satu arah," ujar Andi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Keterpaduan kebijakan di negara lain, lanjutnya, membuat komoditas pertanian mampu bersaing di pasar global. Keberhasilan itu tidak lahir secara instan, tapi dibangun lewat konsistensi regulasi dan keberpihakan pemerintah terhadap sektor produksi. Sehingga

ga wajar saja semua komoditas pertaniannya merajai pasar Eropa dan Amerika.

Di saat yang sama, Indonesia hingga kini justru belum memiliki arah kebijakan komoditas strategis yang jelas dan berkelanjutan. Kondisi itu berdampak langsung pada lemahnya perlindungan harga serta minimnya jaminan usaha bagi petani di daerah. "Sekarang harga cengkeh saja nggak bisa dipertahankan Pemerintah," tegasnya.

Dia menyoroti kasus cengkeh dan kopi di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang tidak mampu bertahan akibat absennya kebijakan penyangga harga. Belum adanya mekanisme penyangga harga yang efektif dalam sistem nasional.

Situasi itu jadi bukti bahwa negara belum hadir secara konkret dalam menjaga keberlangsungan komoditas unggulan daerah. "Akibatnya, petani menjual hasil panen dengan harga murah, sementara keuntungan lebih banyak dinikmati rantai distribusi," ujar legislator asal Sulsel itu.

Karena itu, sambungannya, RUU Komoditas Strategis seharusnya jadi fondasi kebijakan negara untuk melindungi petani dan meningkatkan produksi dalam negeri. Regulasi tidak boleh hanya menitikberatkan pada sanksi tanpa memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Senada, anggota Baleg DPR Firman Soebagyo menegaskan, urgensi pembentukan RUU Komoditas Strategis sebagai payung hukum nasional yang komprehensif. Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas.

Firman menjelaskan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU khusus yang mengatur komoditas strategis secara terpadu. Padahal, Indonesia memiliki ratusan komoditas strategis dan sektor ini memiliki peran vital dalam menopang perekonomian nasional dan stabilitas harga. ■ EYE